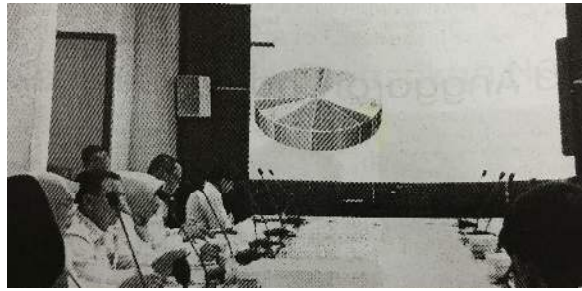


Gaji Guru Honorer Segera Realisasikan



Sumber gambar: Koran Kaltim Kamis, 10/04/2025

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau masih dihadapi dengan problematika gaji guru honorer yang sampai saat ini belum terbayarkan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Berau (Wabup) Gamalis segera mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, BPKAD, dan BKPSDM Berau melalui rapat tertutup.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Kakaban, Kantor Bupati Berau, Tanjung Redeb pada Rabu (9/4/2025) itu bertujuan untuk membahas keberlanjutan nasib para guru honorer di lingkup Pemkab Berau.

Melalui rapat tersebut, Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah, mengatakan ada empat kesimpulan sebagai jawaban atas persoalan gaji guru honorer saat ini.

Pertama mengenai sinkronisasi data pengajar yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud).

Kedua, melakukan kunjungan ke kabupaten/kota yang sudah berhasil melakukan pembayaran gaji tenaga honorer. Ketiga, pembayaran gaji guru honorer tetap mengikuti regulasi yang berlaku dan melalui proses yang sesuai.

Sedangkan yang keempat, guru honorer yang datanya sudah tercatat dalam Dapodik tetap dapat mengajar sembari menunggu proses pembayaran gaji.

Mardiatul juga menekankan pentingnya keputusan terkait pembayaran gaji guru honorer yang harus dilakukan secara lintas sektoral dan berdasarkan kajian yang matang agar tidak melanggar hukum.

“Solusinya harus diputuskan bersama-sama dan mencari pembenaran melalui regulasi, jangan sampai keputusan yang diambil nantinya justru terjerat hukum,” ujarnya.

Mengenai pembayaran gaji, pihaknya memastikan bahwa dana sudah disiapkan dan proses akan segera dilakukan. Namun, mereka masih menunggu regulasi yang jelas serta hasil rapat dengan kepala sekolah yang akan disampaikan ke guru-guru honorer.

“Menurut data Dapodik, ada sekitar 388 guru honorer yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Berau. Mereka tetap bisa mengajar karena tenaga pendidik ini sangat penting untuk kelancaran proses belajar mengajar,” tambahnya.

Ia juga menyoroti dampak dari pemberhentian tenaga honorer yang sempat melumpuhkan beberapa sekolah, terutama di Kecamatan Tanjung Redeb. Sekolah yang paling terdampak kekurangan guru adalah SMP 3 Biatan, yang kehilangan hingga 12 guru honorer.

“Yang paling banyak terdampak memang di Kecamatan Tanjung Redeb. Tapi, sekolah yang paling terdampak karena kekurangan guru adalah SMP 3 Biatan,” tutupnya.
(ri/ha/rm)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Gaji Guru Honorer Segera Realisasikan, 10/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (3) UU 14/2005 bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama.